



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2019
TENTANG
TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN
DATA BATIMETRI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOODINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia perlu mengintegrasikan data batimetri nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati kemaritiman secara berkelanjutan yang berada di dalam wilayah negara dan wilayah hak berdaulat Indonesia;
2. bahwa dalam rangka mengefektifkan fungsi pengendalian, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga dalam pengintegrasian, penyediaan, dan berbagi pakai data batimetri perlu dibentuk tim nasional;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI INDONESIA.

KESATU : Membentuk Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan batimetri nasional;
2. sinkronisasi antar kementerian/lembaga dalam kegiatan survei batimetri;
3. menyusun pedoman teknis terkait integrasi data batimetri nasional yang akan ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang informasi geospasial; dan
4. melaksanakan proses integrasi data batimetri antar kementerian/lembaga.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA, Tim Nasional melaksanakan hal sebagai berikut:

1. melakukan rapat koordinasi integrasi data batimetri antar kementerian/lembaga paling sedikit dua kali dalam satu tahun;
2. menyediakan akses untuk berbagi pakai data dan penyebarluasan data batimetri melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
3. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pekerjaan setiap akhir tahun anggaran kepada Ketua Pengarah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana dapat membentuk tim pakar yang terdiri atas akademisi dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data batimetri nasional.
- KELIMA : Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau kementerian/lembaga yang perwakilannya tercantum di dalam Tim Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL
PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI
INDONESIA

TIM NASIONAL PENYELENGGARAAN DATA BATIMETRI INDONESIA

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Pengarah | : | |
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman |
| Anggota | : | 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Menteri Perhubungan 3. Kepala Badan Informasi Geospasial 4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 6. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| Pelaksana: | | |
| Ketua | : | Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
| Wakil Ketua I | : | Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI Angkatan Laut |
| Sekretaris | : | Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial |
| Koordinator Teknis | | |
| A. Bidang Penjaminan Kualitas | : | Direktur Operasi Survei dan Pemetaan Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI AL |
| B. Bidang Pengumpulan Data | : | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |

C. Bidang Pengintegrasian Data : Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tim Teknis

: Bidang Penjaminan Kualitas

1. Dr. Eko Yulianto, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, S.H., M.M., Kepala Dinas Hidrografi Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI AL.
3. Ir. Andy Hermanto Sianipar, M.T., Kepala Bidang Afiliasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Farida Lasnawatin, S.T., M.T., Kepala Bidang Pengelolaan Data, Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Tofan Rindoyo, Kepala Subdit Penataan Alur dan Perlintasan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
6. Gatot Haryo Pramono, Kepala Bidang Pemetaan Kelautan, Badan Informasi Geospasial.
7. Ristianto, Kepala Bidang Pemetaan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
8. Syamsul Hadi, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.
9. Dr. M. Ilyas, ST., MSc., Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
10. Dr. Giyanto. MSc., Kepala Bidang Pengelolaan Penelitian, Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI.

Bidang Pengumpulan Data

1. Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc., Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
3. Letkol Laut (KH) Dikdik S Mulyadi, M.T., Kepala Subdis Basis Data Batimetri Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI AL.
4. Mayor Laut (KH) Leonardo Rexano, S.T., Kepala Seksi Pengolahan Data Batimetri Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI AL.
5. Muhammad Burhanuddin Borut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Erni Sulastri, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
7. Sutisna, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Novelya Marta Uly Napitupulu, Pengelola Data dan Informasi, Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Catur Susilo Ardi, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
10. Eva Novita, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
11. Fatichatus Istighfarini, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
12. Dwi Haryanto, Balai Teknologi Survey Kelautan, BPPT.
13. M Hasanudin, Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI.

Bidang Pengintegrasian Data

1. Bambang Wiyanto, Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
2. Laniy Meitia Putri, Kepala Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Rachman Rifa'i, Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.
4. Sora Lokita, Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Mustafa Hanafi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Agus Dany Prabowo, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan.
7. Andrian Libriyono, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
8. Sandi Aditya, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
9. Teguh Sulistian, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
10. Rifqi Muhammad Harrys, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
11. Nadia Shalehah, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.
12. Priyadi Dwi Santoso, Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI.

13. Imam Mudita, Balai Teknologi Survey Kelautan, BPPT Bidang Berbagi Pakai dan Penyebarluasan Data.
14. Wendra, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN", "SEKRETARIAT KEMENTERIAN", "KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN", and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Budi Purwanto".

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002